

**PENGARUH PDRB, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN  
TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA**

**TAHUN 1999-2013**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar sarjana pendidikan



Oleh

Priyo Adi Nugroho

09404244011

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**PENGARUH PDRB, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN  
TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA**

**TAHUN 1999-2013**

**SKRIPSI**

Oleh:

Priyo Adi Nugroho

NIM. 09404244011

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 24 Juni 2015

Untuk dipertahankan di depan TIM Penguji Skripsi

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Mengetahui:

Dosen Pembimbing



Aula Ahmad Hafidh SF, M. Si

NIP. 19751028 200501 1 002

**PENGESAHAN**  
**PENGARUH PDRB, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN**  
**TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 1999-2013**

**SKRIPSI**

Oleh

**Priyo Adi Nugroho**

**NIM. 09404244011**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi  
 Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta  
 pada tanggal 9 Juli 2015 dan dinyatakan lulus.

**TIM PENGUJI**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
Dr. Endang Mulyani, M. Si.	Ketua Penguji		3/8/15
Aula Ahmad HSF, M. Si	Sekretaris Penguji		3/8/15
Losina P., SE., M Ec.Dev., Ph.D.	Penguji Utama		30/7/15

Yogyakarta, 7 Agustus 2015  
 Fakultas Ekonomi  
 Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP.19550328 198303 1 002

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Priyo Adi Nugroho

NIM : 09404244011

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 1999-2013.

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan skripsi yang lazim. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 Mei 2015

Penulis

Priyo Adi Nugroho  
NIM. 09404244011

## *MOTTO*

**“Allah adalah sebaik-baiknya tempat meminta.”**

**“Kesempurnaan dan kebenaran adalah milik Allah SWT.”**

**“Satu-satunya orang yang harus kita lampui adalah diri kita sendiri.”**

**“Tak ada kasih yang tak retak.”**

## *PERSEMBAHAN*

*Karyaku ini kupersembahkan untuk:*

*Kedua orang tuaku Bapak Supriyadi & Ibu Titik Nurmayati.*

*yang senantiasa memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk anakmu ini. Serta*

*adikku Amy Wibawanti.*

**ABSTRAK****Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 1999-2013****Oleh:****Priyo Adi Nugroho****NIM. 09404244011**

Kemiskinan menjadi salah satu masalah fundamental dari suatu daerah yang didalamnya terdapat berbagai faktor yang dapat menjadi penyebabnya. Dari beberapa faktor itu, dipilih variabel PDRB, tingkat pendidikan, dan pengangguran yang di diagnosa memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 1999-2013.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DIY dan sumber lainnya sebagai pendukung. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB dan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang negatif terhadap variabel kemiskinan, Untuk variabel pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap variabel kemiskinan di kota Yogyakarta di tahun 1999-2013. Kemudian dari ketiga variabel independen dinyatakan mempengaruhi kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 1999-2013.

*Kata Kunci: PDRB, Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan.*

**ABSTRACT****Effects of GRDP, Educational Levels, and Unemployment Rates on Poverty in Yogyakarta City in 1999-2013****Priyo Adi Nugroho**  
**NIP 09404244011**

Poverty is one of fundamental problems in a region in which a number of factors can generate its occurrence. Gross regional domestic product (GRDP), educational levels, and unemployment rates are among the influencing factors which may contribute to the occurrence of poverty. By considering this background, this present study was aimed at investigating the effects of GRDP, educational levels, and unemployment rates on poverty in Yogyakarta from 1999 to 2013.

The data in the study were secondary data collected from the Central Agency of Statistics of the Province of Yogyakarta Special Territory and other supporting sources. The data were analyzed by a descriptive analysis method.

The results of the study indicated that GRDP and educational levels had a negative correlation with the variable of poverty. Indeed, unemployment rates had a positive effect on the occurrence of poverty in Yogyakarta from 1999 to 2013. It was also found that the three independent variables affected the poverty.

**Keywords:** *GRDP, Educational Levels, Unemployment Rates, Poverty*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis curahkan pada Allah SWT, atas segala kasih sayang, hidayah, akal pikiran, dan atas segala kemudahan. Hanya karena rahmat, karunia, dan berkah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 1999-2013” ini.

Penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program studi pendidikan ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi dengan penyusunan tugas akhir skripsi ini.
3. Bapak Aula Ahmad Hafidh SF, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi atas motivasi, dan arahan dalam membimbing, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Losina Purnastuti, selaku narasumber yang telah memberikan masukan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini dan sekaligus sebagai penguji utama yang telah meluangkan waktu untuk menguji.
5. Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti dan semoga ilmu yang penulis terima akan dapat bermanfaat dan dipergunakan sebaik-baiknya.
6. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan motivasi serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan karya ini dapat terselesaikan.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Pendidikan Ekonomi angkatan 2009, Sahabat dan teman-teman “*JFF*” serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sudah berusaha maksimal dalam penyelesaian skripsi ini, namun jika masih ada kekurangan penulis mohon kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis

Priyo Adi Nugroho

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN TEORI .....	12
A. Deskripsi Teori .....	12
B. Penelitian yang Relevan .....	39
C. Kerangka Berpikir .....	41
D. Paradigma Penelitian .....	43
E. Hipotesis Penelitian .....	44
BAB III METODE PENELITIAN .....	45
A. Metodologi Penelitian .....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
C. Definisi Operasional .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Teknik Analisis Data .....	48
BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....	50

A. Deskripsi Obyek Penelitian .....	50
B. Hasil dan Pembahasan .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Presentase Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013 ...	2
1.2 Presentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013 .....	4
1.3 Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Pendidikan Tertinggi Menengah Atas yang ditamatkan Tahun 1999-2013 .....	6
1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1999-2013 .....	7
4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1999-2013 .....	51
4.2 Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Pendidikan Tertinggi Menengah Atas yang ditamatkan Tahun 1999-2013 .....	53
4.3 Presentase Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013....	54
4.4 Presentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013 .....	56
4.5 Perbandingan Data PDRB dan Kemiskinan.....	57
4.6 Perbandingan Data Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan.....	61
4.7 Perbandingan Data Pengangguran dan Kemiskinan .....	65

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
2.1. Ilustrasi Lingkaran Kemiskinan .....	37
2.2. Alur Berpikir .....	43
4.1 Gambar Kuadran PDRB dan Kemiskinan .....	59
4.2 Gambar Kuadran Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan .....	62
4.3 Gambar Kuadran Pengangguran dan Kemiskinan .....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jumlah pengangguran di DIY masih tinggi, berdasarkan Sakernas Agustus (BPS) Tahun 2012, pengangguran terbuka di DIY berjumlah 77.150 orang, atau naik 2.883 orang dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan jumlah angkatan kerja yang tiap tahun bertambah sehingga diperlukan upaya-upaya dalam menekan laju pertumbuhan penganggur tersebut. Tahun 2012 pertumbuhan kesempatan kerja juga sangat positif dengan penambahan 69.113 sehingga mampu menekan tingkat pengangguran terbuka agar tidak naik yaitu pada angka 3,97 %. dari sisi angka penganggur terbuka di DIY sudah sangat rendah dibandingkan angka nasional yang mencapai angka 6,14 %. tetapi permasalahan pengangguran di DIY bukan hanya pengangguran terbuka tetapi juga setengah penganggur terpaksa dengan jumlah: 144.874 orang. dan penduduk yang bekerja pada sektor-sektor informal dengan produktivitas yang rendah.

Menurut Todaro (2000), bahwa pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

**Tabel 1.1 Presentase Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta  
Tahun 1999-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>
1999	12.04	2007	9.64
2000	11.64	2008	8.84
2001	12.54	2009	7.03
2002	11.03	2010	6.41
2003	6.41	2011	5.57
2004	5.57	2012	6.03
2005	6.03	2013	6.57
2006	5.34		

Sumber: Statistik kota Jogja tahun 1999-2014 dan telah diolah kembali.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Ukuran ini menitikberatkan perhatiannya pada kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto). Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat (Sadono Sukirno, 2005).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Mudrajad Kuncoro, 1997). Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan ukuran pendapatan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Apabila dilihat berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, meliputi (1) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun; (2) *cyclical poverty*, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *seasonal poverty*, adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian; dan (4) *accidental poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Sastraamadja, 2003).

Menurut Sharp (dalam mudrajat Kuncoro, 2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena

rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

**Tabel 1.2**  
**Presentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 1999-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>
1999	12.34	2007	9.78
2000	11.3	2008	10.81
2001	11.67	2009	10.05
2002	10.62	2010	9.75
2003	8.86	2011	9.62
2004	8.62	2012	9.38
2005	8.76	2013	9.38
2006	10.22		

Sumber: Statistik kota Jogja tahun 1999-2014 dan telah diolah kembali.

Dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Masyarakat digolongkan ke dalam penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Selanjutnya, melalui pendekatan ini dapat digunakan untuk menghitung persentase penduduk miskin terhadap total penduduk (*head count index*).

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Menanggapi hal ini, pemerintah kota Yogyakarta mengeluarkan surat keputusan walikota Yogyakarta dengan nomor 616/KEP/2007 pada tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

Dengan adanya surat keputusan walikota Yogyakarta tersebut, tujuannya diantaranya adalah dapat Memperkuat basis data penduduk miskin dan pengangguran, Mengurangi jumlah penduduk miskin, Mengurangi tingkat pengangguran, dan Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun

bagi penduduk miskin. Hal ini begitu menjadi perhatian oleh pemerintah, karena dengan adanya pengangguran, masalah lain-pun bisa muncul dan menjadi efek domino terhadap kemunculan masalah yang lain seperti kemiskinan.

**Tabel 1.3 Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Pendidikan Tertinggi Menengah Atas Yang ditamatkan Tahun 1999-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>
1999	35.63	2007	38.57
2000	37.51	2008	36.34
2001	35.34	2009	39.21
2002	36.51	2010	39.59
2003	39.59	2011	40.86
2004	41.86	2012	41.47
2005	41.47	2013	41.47
2006	36.69		

Sumber: Statistik kota Jogja tahun 1999-2014 dan telah diolah kembali.

Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Pendidikan akan memberikan pengaruh dalam jangka panjang dalam memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. dalam tingkatan tertentu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk satu-satunya

memperoleh pekerjaan, dimana dibutuhkan juga kreatifitas dan daya saing dalam melakoni rutinitasnya. Pendidikan dapat mengasah kemampuan dan ketrampilan dalam menghadapi masalah serta menyelesaikannya dengan tepat.

Seperti terlihat dalam table 1.3 bahwa lulusan pendidikan menengah atas di kota Yogyakarta masih terlihat terjadi penurunan. Pada tahun 2008 presentase tamatan SLTA yang mencapai 36,34 % malah menurun di tahun 2009 dengan presentase 39,21. Seiring waktu, pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal ini dinas pendidikan dalam mengentaskan siswa sekolah lanjutan tingkat atas ditahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2011 sampai tahun 2012 karena terjadi peningkatan presentase siswa tamatan di tingkat atas ini.

**Tabel 1.4**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta atas Dasar Harga Konstan**  
**2000 Tahun 1999-2013 (dalam persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1999</b>	1.03	2007	4.46
<b>2000</b>	3.07	2008	5.12
<b>2001</b>	3.29	2009	4.46
<b>2002</b>	5.46	2010	5.97
<b>2003</b>	5.97	2011	5.35
<b>2004</b>	5.35	2012	6.76
<b>2005</b>	6.76	2013	5.64

---

<b>(sambungan)</b>	
<b>2006</b>	3.97

---

Sumber: Statistik kota Jogja tahun 1999-2014 dan telah diolah kembali.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk, karena pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi harus dinikmati oleh penduduk. Jumlah penduduk perlu diperhatikan, karena selain sebagai subjek, penduduk juga merupakan objek pembangunan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek kependudukan akan mempengaruhi proses pembangunan serta tujuan yang hendak dicapai. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja yang cepat dan menyebabkan jumlah lapangan kerja menjadi sempit atau sedikit. Hal ini dapat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu daerah menunjukkan kurang berhasilnya pembangunan.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang. Tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata memiliki hubungan yang saling berkaitan. Bagi para tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di

sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, salah satu mekanisme pokok untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara sedang berkembang adalah memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin (Arsyad, 1997).

Berdasarkan beberapa uraian dan data yang dituliskan, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana Pengaruh PDRB Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Yogyakarta Periode Tahun 1999-2013.

## **B. Batasan Masalah**

Permasalahan yang dibatasi dalam penelitian ini yang terkait dengan kemiskinan adalah tingkat PDRB, tingkat pendidikan dan pengangguran yang digunakan adalah data Kota Yogyakarta pada tahun 1999 sampai tahun 2013.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana hubungan PDRB, tingkat pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta.
2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta.
3. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta.
4. Pengaruh PDRB, tingkat pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan di bidang pendidikan, terutama yang terkait dengan pengaruh PDRB, dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan.
- b. Diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan acuan baik dalam acuan belajar ataupun acuan untuk menentukan kebijakan ataupun penelitian yang akan dilakukan pembaca selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **F. Deskripsi Teori**

##### **1. PDRB**

###### **a. Pengertian PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Dalam bukunya, Hadi Sasana menulis bahwa PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Rincian penjelasannya sebagai berikut :

1) Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; (1) pertanian; (2) pertambangan dan pengalihan; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7)

pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) jasa-jasa.

## 2) Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b) Konsumsi pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor netto.

## 3) Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.
- b. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

## **2. Tingkat Pendidikan**

Keberadaan pendidikan merupakan khas yang hanya ada pada dunia manusia, dan sepenuhnya ditentukan oleh manusia, tanpa manusia pendidikan tidak pernah ada, *human life is just matter of education* (Suparlan Suhartono, 2008). Keberadaan kegiatan mendidik tersebut tidak hanya

menembus dimensi waktu akan tetapi juga menembus dimensi tempat, dalam arti pendidikan telah berlangsung di segala waktu dan tempat. Oleh karenanya, kegiatan pendidikan dapat dikatakan bersifat fundamental, universal, dan fenomenal.

Fundamentalitas pendidikan ini dapat ditentukan dari kedudukan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama dan penting dalam meningkatkan segenap potensi anak menjadi sosok kekuatan sumberdaya manusia (*human resources*) yang berkualitas bagi suatu bangsa. Tanpa melalui pendidikan seorang anak diyakini tidak akan menjadi sosok manusia utuh (*a fully functioning person*). Universalitas pendidikan dapat dilihat dari proses hiruk pikuk pendidik-an yang telah dilakukan umat manusia dalam dimensi waktu maupun tempat. Pada waktu kapanpun dan di manapun pendidikan selalu saja diselenggarakan.

Praktek pendidikan diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi kemajuan pada semua kelompok masyarakat. Pendidikan diharapkan bisa menjadikan individu dan kelompok masyarakat sebagai warga negara (*members of the nation-state*) yang baik, sadar akan hak dan kewajibannya disatu sisi, serta dapat mempersiapkan individu dan kelompok masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja disisi yang lain (Achmad Dardiri, 2005). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah menyebutkan bahwa pendidikan diarahkan untuk mengembangkan segenap potensi yang ada pada diri peserta didik untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

John Dewey, mengartikan pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental baik secara intelektual maupun emosional kearah alam dan sesama manusia. Jean Jaques Rousseau menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha memberi bekal yang tidak ada pada masa kanak-kanak akan tetapi dibutuhkannya pada masa dewasa. G. Terry Page, J.B. Thomas, dan A.R. Marshall, pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan dan perilaku manusia secara keseluruhan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepirtual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jalur pendidikan yang ada di Indonesia meliputi:

- a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Jenjang pendidikan formal:

- 1) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
  - 2) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
  - 3) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan

nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.

- c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (human capital) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-

hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2004).

### **3. Pengangguran**

Menurut sadono sukirno (2004) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.

Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi; satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya

pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi.

Bagi negara-negara berkembang keadaan perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Karena akan selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak akan terdapat kesulitan memperoleh kesempatan kerja. Jika mereka tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur, maka akan justru menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah.

Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan ekonomi yang terus-menerus. Semua ini memerlukan lebih banyak investasi. Bagi negara berkembang, cepatnya perkembangan penduduk menjadi sebuah ganjalan dalam perkembangan ekonomi, karena negara-negara ini memiliki sedikit kapital.

P. Todaro (2000), menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu

faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

G. Mankiw (2006), dalam bukunya menyatakan bahwa orang dewasa yang berumur 16 tahun keatas digolongkan dalam 3 tingkatan,

- a. Bekerja, kategori ini mencakup seseorang yang bekerja sebagai pegawai yang menerima upah, bekerja pada usaha milik sendiri, atau bekerja sebagai pegawai yang tidak menerima upah pada usaha keluarga. Kategori ini juga mencakup mereka yang memiliki pekerjaan namun tidak sedang bekerja karena untuk sementara waktu absen. Missal karena liburan, sakit, atau cuaca yang buruk.
- b. Tidak bekerja, kategori ini mencakup mereka yang tidak bekerja, memiliki keinginan untuk bekerja, memiliki keinginan bekerja, dan telah mencoba mencari pekerjaan selama 4 minggu terakhir. Kategori ini juga mencakup mereka yang sedang menunggu panggilan kerja kembali dari tempat dimana mereka diberhentikan dari pekerjaannya.

- c. Tidak masuk dalam angkatan kerja, kategori ini mencakup mereka yang tidak termasuk dalam dua kategori awal seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau pensiunan.

Pada masa sekarang usaha-usaha mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan secara matang. Disamping itu, disertai pula kesadaran akan ketenagakerjaan yang lebih demokratis menyangkut hak-hak memilih pekerjaan, lapangan pekerjaan, lokasi pekerjaan sesuai kemampuan, kemauan tenaga kerja tanpa diskriminasi.

Pemecahan masalah pengangguran terutama menjadi peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih serius menangani masalah ketenagakerjaan setempat.

Pengangguran yang terjadi disuatu negara menimbulkan masalah yang kompleks dan pembangunan yang dilakukan akan terhambat. Pengangguran berdampak negatif terhadap kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat. Akibat tuntutan hidup meningkat maka gejala sosial yang terjadi yaitu,

- a. Meningkatnya kriminalitas
- b. Lingkungan kumuh
- c. Kualitas hidup yang semakin menurun
- d. Kesehatan penduduk menurun karena kekurangan gizi dan lingkungan yang tidak sehat

e. Kualitas tenaga kerja menurun karena biaya pendidikan mahal

Yang menjadi masalah besar untuk saat ini di negara kita adalah meningkatnya angka pengangguran pada setiap tahunnya. Dan menyangkut faktor utama dalam permasalahan tersebut bisa saja beragam, itu artinya tidak hanya satu faktor yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia pada setiap tahunnya meningkat.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diharapkan pemerintah sangat mengharapkan agar seluruh warga tenaga Indonesia dapat ikut berpartisipasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa hal yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran di negara ini semakin meningkat, yaitu sebagai berikut:

a. Rendahnya Pendidikan

Masalah pertama yang kerap terjadi dalam penerimaan pegawai yaitu rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh sebagian orang. Jika mereka hanya memiliki tingkat pendidikan yang minim, itu bisa menjadikan seseorang kesulitan dalam mencari setiap pekerjaan.

b. Keterampilan Yang Kurang

Mungkin untuk saat ini telah banyak diantaranya mahasiswa atau lulusan SMA yang memiliki kriteria yang diinginkan oleh para perusahaan. Akan tetapi hal tersebut tidak akan berguna tanpa adanya keterampilan yang mereka miliki.

Karena perusahaan bukan hanya mencari kandidat yang memiliki jenjang pendidikan yang luas, akan tetapi keterampilan yang mereka punyalah yang pihak perusahaan inginkan.

c. Lapangan Kerja Yang Kurang

Untuk setiap tahunnya mungkin negara kita ini memiliki sejumlah lulusan dengan angka yang tidak sedikit. Akan tetapi dengan angka yang tidak sedikit ini tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di negara ita ini.

d. Tidak Ada Kemauan Untuk Berwirausaha

Umumnya seseorang yang baru lulus sekolah/kuliah terpaku dalam mencari pekerjaan, seolah itu adalah tujuan yang sangat mutlak. Sehingga persaingan mencari pekerjaan lebih besar di bandingkan membuat suatu usaha.

e. Tingginya Rasa Malas

Dalam masalah ini tingkat kemalasan yang menjadikan merkea menjadi pengangguran berat, mereka hanya mengandalkan orang lain tanpa adanya usaha maksimal yang dilakukan.

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan

saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.

- b. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

#### 4. Kemiskinan

Masalah kemiskinan memang telah ada sejak lama. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini, kemiskinan bisa berarti bahwa mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di

penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Menurut pendapat Mudrajat Kuncoro dalam Dian Adi Wibowo (skripsi, 2013) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dalam pengertian tersebut perlu adanya pemahaman terkait standar hidup minimum.

Dengan kata lain, kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: Pertama, kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Mudrajat, 2008: 111).

Definisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, erat kaitannya dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
- b. Kemiskinan relatif, kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan. Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
  - 1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,
  - 2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan,

- 3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya,
- 4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara,
- 5) perbedaan struktur industri,
- 6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan
- 7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang system politik yang dapat menentukan kemampuan

sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Menurut Sharp (dalam Mudrajad Kuncoro, 2001) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab yang lain adalah

masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan social bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Menurut Lincoln Arsyad (2010), ukuran indikator kemiskinan antara lain:

- a. Tingkat konsumsi beras perkapita pertahun
- b. Tingkat pendapatan
- c. Indikator kesejahteraan rakyat.

Menurut publikasi PBB tahun 1961 yang berjudul *International definition and measurement of level of living: an interim guide* dikemukakan ada Sembilan komponen kesejahteraan, antara lain: kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan social, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Menurut UNDP tolak ukur kemiskinan dari seseorang adalah jika dia tidak mampu menjangkau (atau bahkan tidak mempunyai akses) terhadap sarana publik dasar dan tingkat kualitas hidup mereka sendiri rendah, bukan berapa banyak pendapatan per dollar per kapita yang mampu mereka raih (Lincoln Arsyad, 2010:305)

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (Head Count Index), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. Salah satu cara mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni mengukur derajat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien Gini antar masyarakat miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan (CV) antar masyarakat miskin (CVP). Koefisien Gini atau CV antar masyarakat miskin tersebut penting diketahui karena dampak guncangan perekonomian pada kemiskinan dapat sangat berbeda tergantung pada tingkat dan distribusi sumber daya diantara masyarakat miskin.

Prinsip-prinsip untuk mengukur kemiskinan, yakni: anonimitas, independensi, maksudnya ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Prinsip monotonisitas, yakni bahwa jika kita memberi sejumlah uang kepada seseorang yang berada dibawah garis kemiskinan, jika diasumsikan semua pendapatan yang lain tetap maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi dari pada sebelumnya. Prinsip sensitivitas distribusional menyatakan bahwa dengan semua hal lain

konstan, jika anda mentransfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin.

Dua indeks kemiskinan yang sangat sering digunakan karena memenuhi empat kriteria tersebut adalah Indeks Send dan Indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT) (P alpa). UNDP selain mengukur kemiskinan dengan parameter pendapatan pada tahun 1997 memperkenalkan apa yang disebut Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) (Human Poverty Indeks-HPI) atau biasa juga disebut Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks-HDI), yakni bahwa kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (three key deprivations), yaitu kehidupan, pendidikan dan ketetapan ekonomi.

Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995) yang dilakukan pada tujuh belas propinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat
- b. kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga.
- c. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja.

- d. Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian.
- e. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah.
- f. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dikukan oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- g. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada.

Selain itu kemiskinan dapat terjadi akibat sistem ekonomi yang berlaku karena yang kuat menindas yang lemah, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai bagi golongan yang bersangkutan, struktur pemilikan, dan penggunaan tanah, pola usaha yang terbelakang, dan pendidikan angkatan kerja yang rendah. Dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat terhadap rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima, pada gilirannya pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.

Menurut Ginanjar (1996) ada 4 faktor penyebab kemiskinan, faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Rendahnya taraf pendidikan.
- b. Rendahnya taraf kesehatan.
- c. Terbatasnya lapangan kerja.
- d. Kondisi keterisolasian.

Kemiskinan melekat pada diri penduduk miskin, mereka miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki aset produksi karena mereka miskin, akibatnya mereka terjatuh dalam lingkungan kemiskinan tanpa ujung dan pangkal. Pendapat Ginanjar (1996) bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Sumber daya alam yang rendah.
- b. Teknologi dan unsur penduduknya yang rendah.
- c. Sumber daya manusia yang rendah.
- d. Saran dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.

Rendahnya beberapa faktor di atas menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat pada rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima yang pada gilirannya pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.

Salah satu teori kemiskinan, yaitu teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) mengatakan bahwa, suatu negara miskin karena negara itu pada dasarnya memang miskin. Teori ini merupakan konsep yang mengandaikan suatu hubungan melingkar dari sumber-sumber daya yang cenderung saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa

sehingga menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan. Dengan kata lain, lingkaran setan merupakan analogi yang mengumpamakan bahwa kemiskinan itu ibarat sebuah lingkaran yang tidak memiliki pangkal ujung, sehingga akan terus berputar pada lingkaran yang sama.



Gambar 2.1 ilustrasi lingkaran kemiskinan menurut Nurkse

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin” (*A country is poor because it is poor*).

Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal.

Dari segi penawaran modal lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan secara berikut. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah. Keadaan yang terakhir ini selanjutnya akan dapat menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap rendah. Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda. Di negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal yang belakangan disebutkan ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah.

Sedangkan pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal.

Di sisi lain Nurkse menyatakan bahwa peningkatan pembentukan modal bukan saja dibatasi oleh lingkaran perangkap kemiskinan seperti yang dijelaskan di atas, tetapi juga oleh adanya *international demonstration effect*. Yang dimaksudkan dengan ini adalah kecenderungan untuk mencontoh gaya konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju (Agus Suman, 2006).

### **G. Penelitian yang Relevan**

1. Fitri Amalia (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di KTI. variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di KTI. Pendidikan menjadi faktor yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan di KTI.
2. Anggit Yoga Permana (2012) dalam skripsinya "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009", menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan

PDRB, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

3. Prastiwi Tri Handayani (2010) dalam skripsinya "Analisis Pengaruh Investasi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kota Propinsi DIY 2004-2009" menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan.
4. Yeny Dharmayanti (2011) dalam skripsinya "Analisis Pengaruh PDRB, Upah Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009" mengemukakan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran. Dengan demikian Hipotesis 1 diterima. Hasil pengujian pengaruh Upah terhadap pengangguran, berarti bahwa Upah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran. Dengan demikian Hipotesis 2 diterima. Hasil pengujian pengaruh Inflasi terhadap pengangguran bahwa inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran. Dengan demikian Hipotesis 3 diterima. Hasil pengujian secara simultan diperoleh kesimpulan bahwa Pengangguran dapat dipengaruhi oleh PDRB, Upah dan Inflasi secara bersama-sama.

## H. Kerangka Berpikir

### 1. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

PDRB dapat menjadi indikator sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Kuznet (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Menurut penelitian Hermanto S. Dan Dwi W. (2007) menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil) yang terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di antara wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan.

### 2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan akan menghalangi seseorang untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Kenyataannya dapat kita lihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber

daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Menurut Simmons (dalam Todaro, 1994), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

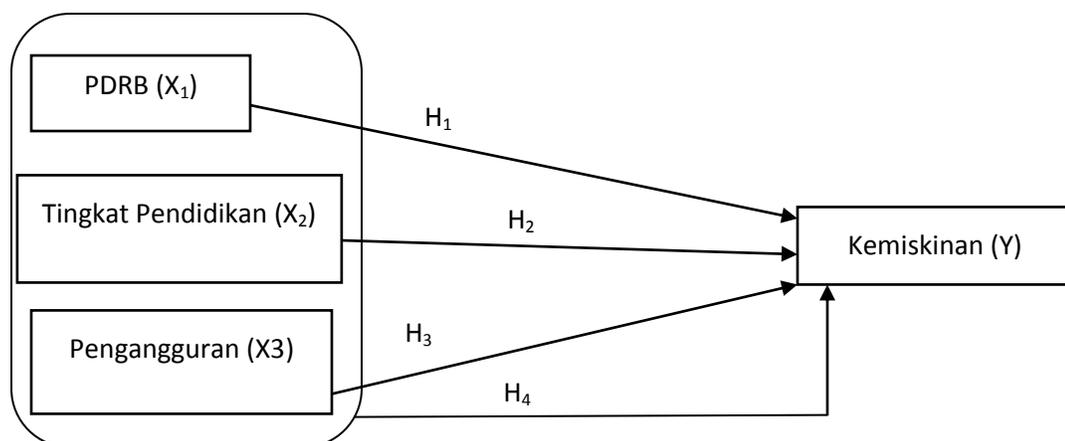
### 3. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam jangka panjang.

Lincoln Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat

yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

## I. Paradigma Penelitian



Gambar 2.2. Alur Berpikir

**J. Hipotesis Penelitian**

1. Ada pengaruh negatif dari PDRB terhadap kemiskinan Di Kota Yogyakarta pada tahun 1999-2013.
2. Ada pengaruh negatif antara tingkat pendidikan dengan kemiskinan Di Kota Yogyakarta pada tahun 1999-2013.
3. Ada pengaruh positif dari pengangguran dan kemiskinan Di Kota Yogyakarta pada tahun 1999-2013.
4. Ada pengaruh secara bersama-sama dari variabel PDRB, tingkat pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan Di Kota Yogyakarta pada tahun 1999-2013.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **K. Metodologi Penelitian**

Pengertian metodologi menurut The Liang Gie dalam Suharyono dan Amien (2013: 65) bahwa:

“Metodologi diartikan sebagai ilmu tentang metode, studi tentang metode, khususnya metode ilmiah, yaitu cara-cara yang dipakai untuk mengejar suatu bidang ilmu. Metodologi diartikan pula sebagai studi mengenai asas-asas dasar dari penyelidikan, seringkali melibatkan masalah-masalah tentang logika, penggolongan dan asumsi-asumsi dasar. Selanjutnya juga diartikan sebagai analisis dan pengaturan secara sistematis mengenai asas-asas dan proses-proses membimbing suatu penyelidikan ilmiah, atau yang menyusun struktur dari ilmu-ilmu khusus secara lebih khusus”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2010: 3):

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain (keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan), yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya”.

Metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah metode bertujuan untuk mengetahui hubungan antara PDRB, tingkat pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan dikota Yogyakarta.

## **L. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di kota Yogyakarta pada bulan April 2015. Pelaksanaan pengambilan data dilakukan di BPS Propinsi DIY dan selanjutnya dilakukan input dan pengolahan data yang didapatkan.

## **M. Definisi Operasional**

### **1. PDRB**

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006). Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. PDRB yang dimaksud adalah laju PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 1999 – 2013 (dalam satuan persen).

### **2. Tingkat Pendidikan**

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan dinyatakan dalam penduduk yang berumur 5 tahun keatas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di kota Yogyakarta, dan lulus pendidikan menengah atas di kota Yogyakarta pada tahun 1999-2013 (dalam satuan persen). Data diambil dari BPS.

### 3. Pengangguran

Pengangguran berarti seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran terbuka adalah penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Data yang digunakan untuk mengetahui pengangguran adalah data penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama yang didalamnya terdapat data pengangguran terbuka di kota Yogyakarta tahun 1999-2013 (dalam satuan persen). Data diambil dari BPS.

### 4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi standar kebutuhan hidupnya. Data yang digunakan berupa persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang dimaksud adalah yang ditetapkan oleh BPS berupa data masing-masing di kota Yogyakarta tahun 1999-2013 (dalam satuan persen).

## **N. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data PDRB, tingkat pendidikan, pengangguran dan tingkat kemiskinan di kota Yogyakarta. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DIY.

## **O. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara pentahapan secara berurutan dengan pendekatan deskriptif, yaitu terdiri dari tiga alur yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data dari hasil dokumentasi data dari BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah selanjutnya adalah penyajian data yang dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk tabel, serta penarikan kesimpulan. Maksud utama penelitian data adalah untuk membuat data itu dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan mampu dikomunikasikan kepada orang lain. Dalam hal ini, penulis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu proses aktifitas dalam analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transparansi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan oleh

peneliti adalah kemudian menyederhanakan dan mengabstrasikan. Dalam reduksi data ini, peneliti melakukan proses living in (data yang terpilih) dan living out (data yang terbuang) dari hasil dokumentasi di BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, dari hasil studi dokumentasi di BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Verifikasi data dan Simpulan

Verifikasi data dan simpulan merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencapai pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul, kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Kesimpulan yang pada awalnya masih kabur, dan diragukan, maka dengan bertambahnya data, menjadi lebih grounded. Kegiatan ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir didapat sesuai dengan rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **P. Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Kota Yogyakarta terletak antara 110° 24'19"-110° 28'53" Bujur Timur dan antara 07°49'26"-07°15'24" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km<sup>2</sup> atau 1,02 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0 - 2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100 – 199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu : Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah :

Sebelah Utara: Kabupaten Sleman

Sebelah Timur: Kabupaten Bantul dan Sleman

Sebelah Selatan: Kabupaten Bantul

Sebelah Barat: Kabupaten Bantul dan Sleman

## 2. Sajian Data

### a. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta pada tahun 2008 mencapai 9.807 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 5.021 milyar rupiah atas dasar harga konstan 2000.

**Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1999-2013 (dalam persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1999</b>	1.03	<b>2007</b>	4.46
<b>2000</b>	3.07	<b>2008</b>	5.12
<b>2001</b>	3.29	<b>2009</b>	4.46
<b>2002</b>	5.46	<b>2010</b>	5.97
<b>2003</b>	5.97	<b>2011</b>	5.35
<b>2004</b>	5.35	<b>2012</b>	6.76
<b>2005</b>	6.76	<b>2013</b>	5.64
<b>2006</b>	3.97		

Sumber: diolah dari Kota Jogja Dalam Angka, Statistik tahun 1999-2014

Sektor-sektor yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor-sektor tersier yang meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Angkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Sektor Jasa-jasa. Sumbangan sektor tersier tersebut terhadap PDRB lebih dari 75 persen.

#### **b. Tingkat Pendidikan**

Keberadaan pendidikan merupakan khas yang hanya ada pada dunia manusia, dan sepenuhnya ditentukan oleh manusia, tanpa manusia pendidikan tidak pernah ada, *human life is just matter of education* (Suparlan Suhartono, 2008). Keberadaan kegiatan mendidik tersebut tidak hanya menembus dimensi waktu akan tetapi juga menembus dimensi tempat, dalam arti pendidikan telah berlangsung di segala waktu dan tempat. Oleh karenanya, kegiatan pendidikan dapat dikatakan bersifat fundamental, universal, dan fenomenal.

Fundamentalitas pendidikan ini dapat ditentukan dari kedudukan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama dan penting dalam meningkatkan segenap potensi anak menjadi sosok kekuatan sumberdaya manusia (*human resources*) yang berkualitas bagi suatu bangsa. Tanpa melalui pendidikan seorang anak diyakini tidak akan menjadi sosok manusia utuh (*a fully functioning person*). Universalitas pendidikan dapat dilihat dari proses hiruk pikuk pendidikan yang telah dilakukan umat

manusia dalam dimensi waktu maupun tempat. Pada waktu kapanpun dan di manapun pendidikan selalu saja diselenggarakan.

**Tabel 4.2 Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Pendidikan Tertinggi Menengah Atas yang ditamatkan Tahun 1999-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>
<b>1999</b>	35.63	<b>2007</b>	41.50
<b>2000</b>	37.51	<b>2008</b>	41.50
<b>2001</b>	35.34	<b>2009</b>	37.59
<b>2002</b>	36.51	<b>2010</b>	37.59
<b>2003</b>	39.59	<b>2011</b>	38.86
<b>2004</b>	41.86	<b>2012</b>	41.47
<b>2005</b>	41.47	<b>2013</b>	41.47
<b>2006</b>	37.59		

Sumber: diolah dari Kota Jogja Dalam Angka, Statistik tahun 1999-2014

### **c. Pengangguran**

Pengangguran adalah meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi

belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbukan (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja (BPS, 2008).

Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.

**Tabel 4.3**  
**Presentase Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2006-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>
<b>1999</b>	12.04	<b>2007</b>	9.64
<b>2000</b>	11.64	<b>2008</b>	7.84
<b>2001</b>	12.54	<b>2009</b>	7.03

<b>2002</b>	11.03	<b>2010</b>	7.41
(sambungan)			
<b>2003</b>	6.41	<b>2011</b>	5.57
<b>2004</b>	5.57	<b>2012</b>	5.03
<b>2005</b>	6.03	<b>2013</b>	6.57
<b>2006</b>	7.04		

Sumber: diolah dari Kota Jogja Dalam Angka, Statistik tahun 1999-2014

Dari table 4.3 diatas, tingkat pengangguran tertinggi berada pada tahun 2007 sebanyak 9 persen lebih. Sedangkan untuk tahun dengan tingkat pengangguran terrendah terjadi di tahun 2012 dimana hanya sejumlah 5 persen.

#### **d. Kemiskinan**

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat

yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu.

**Tabel 4.4**  
**Presentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 1999-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>
<b>1999</b>	12.34	<b>2007</b>	9.78
<b>2000</b>	11.3	<b>2008</b>	10.81
<b>2001</b>	11.67	<b>2009</b>	10.05
<b>2002</b>	10.62	<b>2010</b>	9.75
<b>2003</b>	8.86	<b>2011</b>	9.62
<b>2004</b>	8.62	<b>2012</b>	9.38
<b>2005</b>	8.76	<b>2013</b>	9.38
<b>2006</b>	10.22		

Sumber: diolah dari Kota Jogja Dalam Angka, Statistik tahun 1999-2014

Persebaran penduduk miskin di kota yoga tergolong cukup tinggi mencapai lebih dari 10 persen. Hal ini ditunjukkan oleh data persentase kemiskinan pada tabel 4.4 di tahun 2006, 2008, dan 2009. Peningkatan kemiskinan terjadi di tahun 2008 dari sebelumnya hanya berkisar 9 persen, menjadi 10 persen hampir menyentuh angka 11 persen.

## **Q. Hasil dan pembahasan**

### **1. PDRB dan Kemiskinan**

Dari hasil pengamatan data yang telah dilakukan, variabel PDRB menunjukkan hubungan yang negatif terhadap Kemiskinan di kota Yogyakarta. Hasil uji ini sesuai terhadap teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Yang mana menurut Prof. Kuznets (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

**Tabel 4.5 Perbandingan Data PDRB dan Kemiskinan  
Di Kota Yogyakarta tahun 1999-2013**

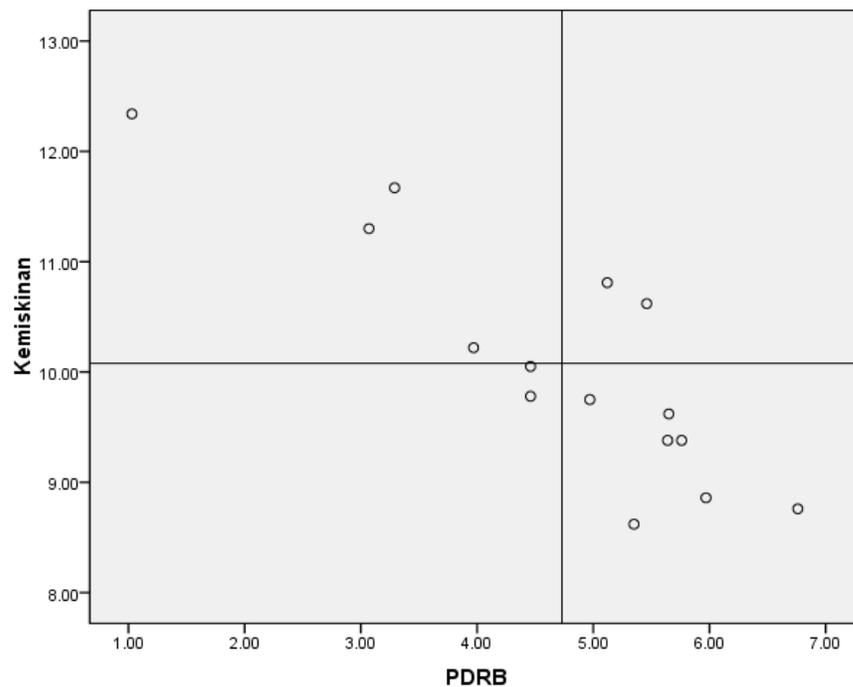
Tahun	PDRB	Kemiskinan
1999	1.03	12.34
2000	3.07	11.3
2001	3.29	11.67
2002	5.46	10.62
2003	5.97	8.86
2004	5.35	8.62
2005	6.76	8.76
2006	3.97	10.22
2007	4.46	9.78
2008	5.12	10.81
2009	4.46	10.05
(sambungan)		
2010	5.97	9.75
2011	5.35	9.62
2012	6.76	9.38
2013	5.64	9.38
Rata-rata	4.73	10.08

Tingkat kesignifikanan PDRB dalam mempengaruhi kemiskinan juga dapat dilihat berdasarkan data bahwa peningkatan laju PDRB di Kota Yogyakarta dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 selalu diiringi dengan penurunan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Program pengentasan kemiskinan yang digadang-gadang pemerintah kota Yogyakarta ternyata masih menyisakan tingginya tingkat kemiskinan yang berada diatas angka 5%.

Laju pertumbuhan PDRB di kota Yogyakarta tertinggi berada pada tahun 2005 sebesar 6,76% dan terendah pada tahun 1999. Pada tahun 1999 sampai tahun 2005 laju pertumbuhan PDRB menunjukkan hasil positif dimana terjadinya peningkatan sebanyak 5 kali dan hanya 1 kali penurunan

ditahun 2004 sebesar 0,62% dari semula 5,97% menjadi 5,35% di tahun 2004. Untuk periode tahun 2005 sampai tahun 2013 terjadi perkembangan yang fluktuatif. Dimana kenaikan dan penurunan laju pertumbuhan penduduk masing-masing sebesar 5 kali dan 3 kali.

Kemiskinan tertinggi di Kota Yogyakarta terjadi pada tahun 1999 dimana mencapai lebih dari 10% dan terendah pada tahun 2004 sebesar 8,62%. Pada tahun 1999 sampai tahun 2005, terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebanyak 4 kali dan kenaikan presentase kemiskinan sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk periode 2005 sampai tahun 2013, hanya terjadi 2 kali kenaikan presentase kemiskinan, yaitu di tahun 2006 sebesar 10,22% dan 2008 sebesar 10,81%. Selain di tahun-tahun tersebut, presentase kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan.



Gambar 4.1 Kuadran PDRB dan Kemiskinan

Grafik kuadran pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berbanding terbalik atau negatif dari variabel PDRB dan kemiskinan. Sumbu X yang mewakili variabel PDRB dimana semakin mengarah kekanan semakin mengarah kearah yang positif, dan sumbu Y mewakili variabel kemiskinan yang semakin keatas mengarah kearah positif. Keadaan titik-titik sumbu koordinat yang mewakili hubungan PDRB dan kemiskinan berada di kuadran yang menunjukkan hubungan positif-negatif pada kuadran III, dan negatif-positif pada kuadran II. Dimana setiap terjadi kenaikan laju pertumbuhan PDRB, maka terjadi penurunan pada variabel

kemiskinan. Dan hal sebaliknya juga terjadi dari penurunan laju pertumbuhan PDRB, maka variabel kemiskinan justru menjadi meningkat.

Dari data yang telah diperoleh, dan analisis dari grafik kuadran, maka PDRB dan kemiskinan di kota Yogyakarta tahun 1999-2013 memiliki hubungan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari tahun 1999 sampai 2013 dimana setiap ada kenaikan laju pertumbuhan PDRB, angka presentase kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Hal ini dapat disimpulkan karena rata-rata hubungan yang terjadi dari keduanya menunjukkan tanda negatif.

## **2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan**

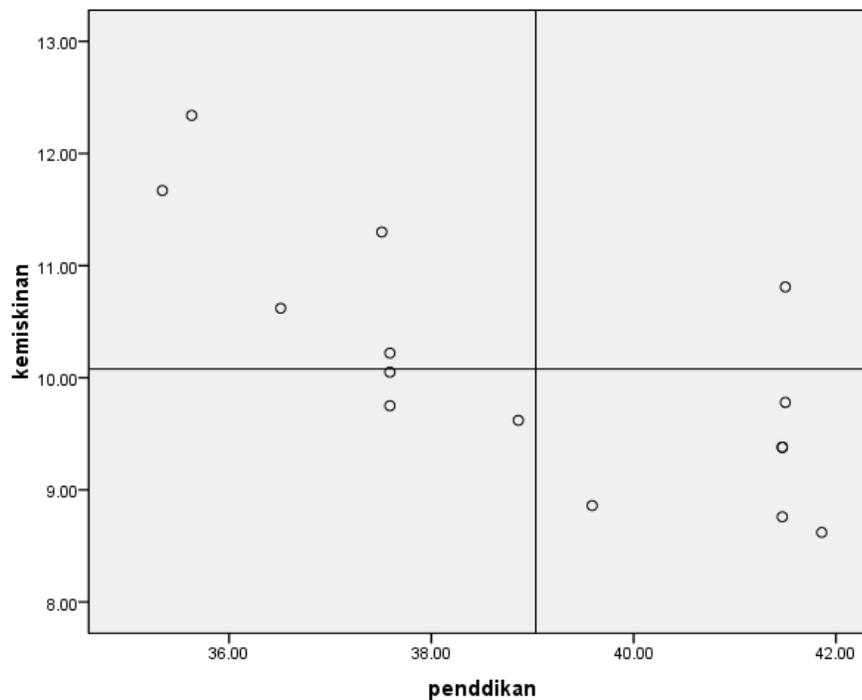
Pada penelitian ini, variabel pendidikan terwakili dengan banyaknya siswa yang menamatkan jenjang menengah atas atau SLTA. Dari data yang diolah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki efek berseberangan dengan kemiskinan. Dimana setiap terjadi kenaikan presentase lulusan menengah atas di kota Yogyakarta, akan menurunkan jumlah angka presentase kemiskinan.

**Tabel 4.6 Perbandingan Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan  
Di Kota Yogyakarta tahun 1999-2013**

Tahun	Tk Pendidikan	Kemiskinan
1999	35.63	12.34
2000	37.51	11.3
2001	35.34	11.67
2002	36.51	10.62
2003	39.59	8.86
2004	41.86	8.62
2005	41.47	8.76
2006	37.59	10.22
2007	41.50	9.78
2008	41.50	10.81
2009	37.59	10.05
2010	37.59	9.75
2011	38.86	9.62
2012	41.47	9.38
2013	41.47	9.38
(sambungan)		
Rata-rata	39.03	10.08

Presentase lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat di kota Yogyakarta tertinggi berada pada tahun 2004 sebesar 41,86% dan terendah pada tahun 2001 berkisar 35%. Pada tahun 1999 sampai tahun 2005 persentase lulusan menunjukkan hasil positif dimana terjadinya peningkatan sebanyak 4 kali dan hanya 2 kali penurunan ditahun 2001 dimana dari semula 37,51% menjadi 35,34% dan di tahun 2004 sebesar 41,86% menjadi 41,47% ditahun 2005. Untuk periode tahun 2005 sampai tahun 2013 terjadi perkembangan yang fluktuatif. Dimana terjadi kenaikan, penurunan, maupun dengan jumlah yang sama dari tahun sebelumnya seperti yang terjadi di

tahun 2007 sampai 2009 dan tahun 2012 dan 2013 yang memiliki jumlah presentase yang sama.



Gambar 4.2 Kuadran Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan

Kemiskinan tertinggi di Kota Yogyakarta terjadi pada tahun 1999 dimana mencapai lebih dari 10% dan terendah pada tahun 2004 sebesar 8,62%. Pada tahun 1999 sampai tahun 2005, terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebanyak 4 kali dan kenaikan presentase kemiskinan sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk periode 2005 sampai tahun 2013, hanya terjadi 2 kali kenaikan presentase kemiskinan, yaitu di tahun 2006 sebesar 10,22% dan

2008 sebesar 10,81%. Selain di tahun-tahun tersebut, presentase kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan.

Grafik kuadran pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berbanding terbalik atau negatif dari variabel tingkat pendidikan dan kemiskinan. Sumbu X yang mewakili variabel tingkat pendidikan dimana semakin mengarah kekanan semakin mengarah kearah yang positif, dan sumbu Y mewakili variabel kemiskinan yang semakin keatas mengarah kearah positif. Keadaan titik-titik sumbu koordinat yang mewakili hubungan tingkat pendidikan dan kemiskinan berada di kuadran yang menunjukkan hubungan positif-negatif pada kuadran III, dan negatif-positif pada kuadran II. Dimana setiap terjadi kenaikan presentase tingkat pendidikan yang diwakili oleh lulusan tingkat menengah atas, maka terjadi penurunan pada variabel kemiskinan. Dan hal sebaliknya juga terjadi dari penurunan presentase tingkat pendidikan, maka variabel kemiskinan justru menjadi meningkat.

Dari analisis hubungan yang telah dilakukan, variabel Tingkat Pendidikan dan kemiskinan di kota Yogyakarta tahun 1999-2013 memiliki hubungan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari tahun 1999 sampai 2013 dimana setiap ada kenaikan presentase Tingkat Pendidikan, angka presentase kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dan rata-rata hubungan yang terjadi menunjukkan tanda negatif.

Hasil ini sesuai dengan teori menurut Simmons (dalam Todaro, 1994), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Dan menurut Rasidin K dan Bonar M, rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (dalam Van Indra Wiguna, 2013).

### **3. Pengangguran terhadap kemiskinan**

Presentase pengangguran terbuka di kota Yogyakarta tertinggi berada pada tahun 2001 sebesar 12,54% dan terendah pada tahun 2012 berkisar pada angka 5%. Pada tahun 1999 sampai tahun 2005 persentase pengangguran menunjukkan hasil positif dimana terjadinya penurunan sebanyak 4 kali dan hanya 2 kali kenaikan presentase jumlah penganggur terbuka ditahun 2000 dimana dari semula 11,64% menjadi 12,54% dan di tahun 2004 sebesar 5,57% menjadi 6,03% ditahun 2005. Untuk periode tahun 2005 sampai tahun 2013 terjadi perkembangan yang fluktuatif, dimana terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, seperti di tahun 2006 terjadi kenaikan sebanyak 2,6% menjadi hampir 10% ditahun 2007. Keberhasilan pengurangan pengangguran terjadi ditahun 2003 dimana

jumlah pengangguran menyusut dari sebanyak 11 % menjadi hanya berada di angka 6 %.

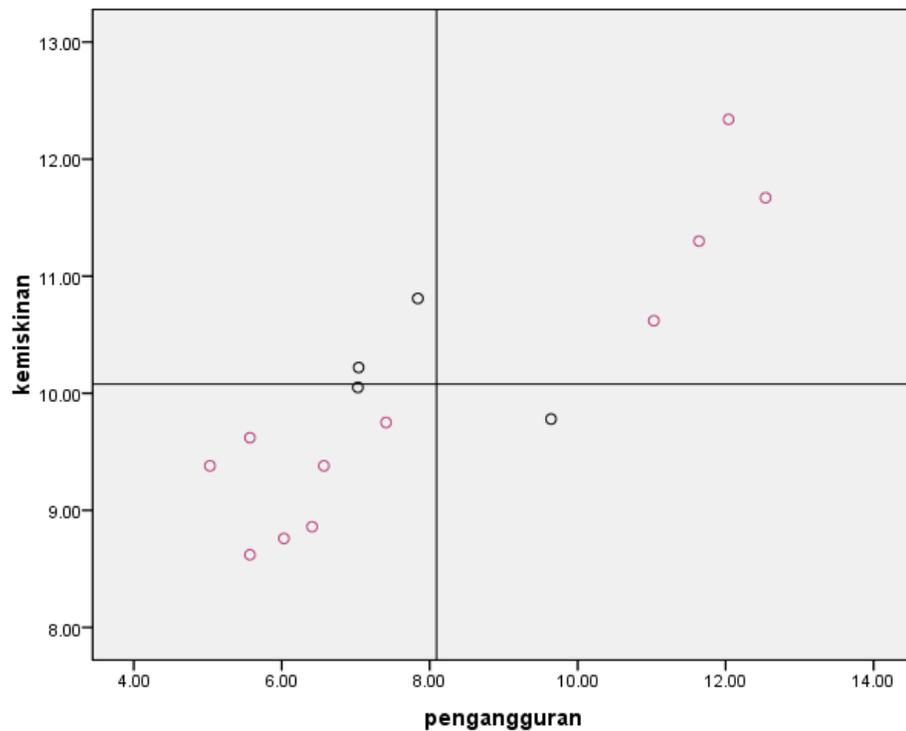
**Tabel 4.7 Perbandingan Data Pengangguran dan Kemiskinan  
Di Kota Yogyakarta tahun 1999-2013**

Tahun	Pengangguran	Kemiskinan
1999	12.04	12.34
2000	11.64	11.3
2001	12.54	11.67
2002	11.03	10.62
2003	6.41	8.86
2004	5.57	8.62
2005	6.03	8.76
2006	7.04	10.22
2007	9.64	9.78
2008	7.84	10.81
2009	7.03	10.05
2010	7.41	9.75
2011	5.57	9.62
2012	5.03	9.38
2013	6.57	9.38
Rata-rata	8.09	10.08

Presentase pengangguran terbuka di kota Yogyakarta tertinggi berada pada tahun 2001 sebesar 12,54% dan terendah pada tahun 2012 berkisar pada angka 5%. Pada tahun 1999 sampai tahun 2005 persentase pengangguran menunjukkan hasil positif dimana terjadinya penurunan sebanyak 4 kali dan hanya 2 kali kenaikan presentase jumlah penganggur

terbuka ditahun 2000 dimana dari semula 11,64% menjadi 12,54% dan di tahun 2004 sebesar 5,57% menjadi 6,03% ditahun 2005. Untuk periode tahun 2005 sampai tahun 2013 terjadi perkembangan yang fluktuatif, dimana terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, seperti di tahun 2006 terjadi kenaikan sebanyak 2,6% menjadi hampir 10% ditahun 2007. Keberhasilan pengurangan pengangguran terjadi ditahun 2003 dimana jumlah pengangguran menyusut dari sebanyak 11 % menjadi hanya berada di angka 6 %.

Kemiskinan tertinggi di Kota Yogyakarta terjadi pada tahun 1999 dimana mencapai lebih dari 10% dan terendah pada tahun 2004 sebesar 8,62%. Pada tahun 1999 sampai tahun 2005, terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebanyak 4 kali dan kenaikan presentase kemiskinan sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk periode 2005 sampai tahun 2013, hanya terjadi 2 kali kenaikan presentase kemiskinan, yaitu di tahun 2006 sebesar 10,22% dan 2008 sebesar 10,81%. Selain di tahun-tahun tersebut, presentase kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan.



Gambar 4.3 Kuadran Pengangguran dan Kemiskinan

Grafik kuadran pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berbanding searah atau positif dari variabel pengangguran dan kemiskinan. Sumbu X yang mewakili variabel pengangguran dimana semakin mengarah kekanan akan semakin mengarah kearah yang positif, dan sumbu Y mewakili variabel kemiskinan yang semakin keatas mengarah kearah positif. Keadaan titik-titik sumbu koordinat yang mewakili hubungan variabel pengangguran dan kemiskinan berada di kuadran yang menunjukkan hubungan positif-positif pada kuadran I, dan negatif-negaif pada kuadran IV. Dimana setiap terjadi kenaikan presentase pengangguran,

maka terjadi kenaikan pada variabel kemiskinan. Dan hal sebaliknya juga terjadi dari penurunan presentase pengangguran, maka variabel kemiskinan justru ikut mengalami penurunan.

Variabel pengangguran menunjukkan hubungan yang positif dan berpengaruh terhadap kemiskinan di kota Yogyakarta. Hasil uji hubungan keduanya ini cocok dengan teori menurut Sadono Sukirno (2004), menurutnya efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **R. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel PDRB menunjukkan hubungan yang negatif terhadap Kemiskinan di kota Yogyakarta. Hasil uji ini sesuai terhadap teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Hasil ini sesuai dengan teori menurut Kuznet (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.
2. Variabel pendidikan terwakili dengan banyaknya siswa yang menamatkan jenjang menengah atas atau SLTA menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki efek berseberangan dengan kemiskinan. Dimana setiap terjadi kenaikan presentase lulusan menengah atas di kota Yogyakarta, akan menurunkan jumlah angka presentase kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan teori menurut Simmons (dalam Todaro, 1994), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Serta rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

3. Variabel pengangguran menunjukkan hubungan yang positif dan berpengaruh terhadap kemiskinan di kota Yogyakarta. Hasil penelitian kali ini cocok dengan teori menurut Sadono Sukirno (2004), menurutnya efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.
4. Dari keseluruhan uji yang dilakukan, ketiga variabel independen yaitu variabel PDRB, Tingkat Pendidikan, dan variabel pengangguran dapat dinyatakan mempengaruhi variabel Kemiskinan yang mana sebagai variabel dependen pada penelitian ini.

## **S. Saran**

1. Pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih terkait kemiskinan di Indonesia. Sinerginya informasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan hasil yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.
2. Hasil kebijakan pemerintah kota Yogyakarta terkait rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kota Yogyakarta dapat

dikatakan berhasil untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari data yang dihimpun oleh peneliti bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun mulai tahun 1999 sampai tahun 2013. Namun untuk masalah pengentasan pengangguran, pemerintah kota Yogyakarta perlu mengusahakan kebijakan yang lebih efektif untuk menguranginya.

3. Pendidikan yang tercermin dari besarnya lulusan sekolah menengah atas, memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, sehingga diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta kembali menggalakkan program pemberantasan putus sekolah supaya dapat menekan kemiskinan di wilayah Kota Yogyakarta. Pengangguran berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif terhadap kemiskinan, dengan hasil tersebut diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta lebih menggerakkan sektor informal. Karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran terbuka, yang mana di dalamnya terdapat golongan masyarakat yang sedang dalam tahap menyiapkan usaha atau mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja yang dimasukkan dalam golongan pengangguran. Sehingga perlunya peningkatan sektor informal untuk menekan kemiskinan adalah karena sektor informal merupakan salah satu solusi masalah dalam mengatasi pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhson. 2009. Diktat Aplikasi Komputer. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arsyad, Licolin. 1997. *The Pattern Of Manufacturing Development In Indonesia In The Period 1976-1993*.
- \_\_\_\_\_. 2010, Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- BPS, berbagai publikasi angkatan kerja dan data inflasi. Diakses dari <http://yogyakarta.bps.go.id> diakses pada tanggal 30 April 2014
- Cahyat. 2004. Bagaimana Kemiskinan Diukur ? Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia. *Governance Brief*, 21 - 8.
- Disnakertrans Propinsi DIY. *Program Kegiatan penanganan Pengangguran Disnakertrans DIY Tahun 2013*.  
<http://www.nakertrans.jogjaprovo.go.id/contentdetil.php?kat=brta&id=NzA%3D&fle=Y29udGVudC5waHA%3D&lback=a2F0PWJydGEhbGJhY2s9JnBhZ2U9Mw%3D%3D>.  
Yogyakarta:2013. diakses tanggal 7 Maret 2014.
- Irdam Ahmad. (2013). *Hubungan Antara Inflasi Dengan Tingkat Pengangguran; Pengujian Kurva Philips Dengan Data Indonesia, 1976-2006*. Thesis. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1997, "Fenomena Tingkat Pengangguran di Indonesia I dan II", Business News, 7 Juli 1997 dan 14 Juli 1997.
- Imam Ghozali, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Journal Of Indonesia Economics and Business (JEBI), vol-non, pp.non
- Komariah, Aan dan Triatna, Cepi. 2005. *Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Laman [http://www.ut.ac.id/html/suplemen/espa4314/espa4314a/materi\\_2\\_2.htm](http://www.ut.ac.id/html/suplemen/espa4314/espa4314a/materi_2_2.htm) diakses tanggal 21 Juli 2014 pukul 12.29 WIB
- Mulyati, Sri. *Analisis hubungan inflasi dan pengangguran di indonesia periode 1985-2008: pendekatan kurva phillips*. Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/14413> pada tanggal 7 Maret 2014
- K. Sitepu, Rasidin dan Bonar M. Sinaga, 2004. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium*.

- Kuncoro Mudrajad. 1997. *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*. Sleman: Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- \_\_\_\_\_. 2001. *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mankiw Gregory. 2006. *Pengantar ekonomi makro = Principles of economics edisi ketiga*. Jakarta: Salemba Empat
- Michael P. Todaro. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedua*, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi ketujuh*. Jakarta: Erlangga
- Prabu Mangkunegara, Anwar. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Rasidin., Bonar., 2009, *Dampak Infestasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*, Prisma, Hal. 17-31, No. 1.
- Ravi D. W.2010.*Analisis Pengaruh Pdrb, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008*. Kumpulan Skripsi UNDIP: Semarang.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LBM
- Rohmat. 2010. *Kepemimpinan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasi*. Purwokerto: STAIN Press
- Sukirno Sadono. 1983. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Makro Ekonomi Modern*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Mikroekonomi: Teori Pengantar (Edisi 3)*. Jakarta: Rajawali Press
- Sasana, Hadi. 2006. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. (27 Agustus 2014)
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tulus H. Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Van Indra W. 2013. *Analisis Pengaruh Pdrb, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*. Kumpulan Skripsi UNIBRAW: Malang.

## LAMPIRAN

### Rekap Data

#### Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta atas Dasar Harga Konstan

2000 Tahun 1999-2013 (dalam persen)

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1999</b>	1.03	2007	4.46
<b>2000</b>	3.07	2008	5.12
<b>2001</b>	3.29	2009	4.46
<b>2002</b>	5.46	2010	5.97
<b>2003</b>	5.97	2011	5.35
<b>2004</b>	5.35	2012	6.76
<b>2005</b>	6.76	2013	5.64
<b>2006</b>	3.97		

Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik tahun 1999-2014

**Rekap Data****Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Pendidikan Tertinggi Menengah  
Atas yang ditamatkan Tahun 1999-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>
1999	35.63	2007	38.57
2000	37.51	2008	36.34
2001	35.34	2009	39.21
2002	36.51	2010	39.59
2003	39.59	2011	40.86
2004	41.86	2012	41.47
2005	41.47	2013	41.47
2006	36.69		

---

Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik tahun 1999-2014

**Rekap Data****Presentase Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta****Tahun 2006-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (%)</b>
1999	12.04	2007	9.64
2000	11.64	2008	8.84
2001	12.54	2009	7.03
2002	11.03	2010	6.41
2003	6.41	2011	5.57
2004	5.57	2012	6.03
2005	6.03	2013	6.57
2006	5.34		

---

Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik tahun 2000-2014

## Rekap Data

### Presentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta

Tahun 1999-2013

Tahun	Jumlah (%)	Tahun	Jumlah (%)
1999	12.34	2007	9.78
2000	11.3	2008	10.81
2001	11.67	2009	10.05
2002	10.62	2010	9.75
2003	8.86	2011	9.62
2004	8.62	2012	9.38
2005	8.76	2013	9.38
2006	10.22		

Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik tahun 2000-2014